

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Adrian Sutedi, 2007, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta
- Amrah Muslimin, 1985, *Beberapa Asas dan Pengertian Pokok Administrasi dan Hukum Administrasi*, Alumni, Bandung.
- Anna Erliyana, 2005, *Keputusan Presiden Analisis Keppres R.I. 1987 – 1998*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Bachsan Mustafa, 2001, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bagir Manan, 1994, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- E. Utrecht, 1962, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Tjetakan Kelima, PT. Penerbit dan Balai Buku "Ichtiar, Djakarta.
- I Dewa Gede Atmadja, dkk, 2015, *Teori Konstitusi & Konsep Negara Hukum*, Setara Press, Malang
- Indroharto, 1999, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, PT. Alumni Bandung.
- J.C.T. Simorangkir, 1986, *Hukum dan Konstitusi Indonesia Jilid 2*, PT. Gunung Agung, Jakarta.
- Kuntjoro Purbopranoto, 1985, *Beberapa Catatan Tentang Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi*, Alumni, Bandung.
- Lintong O. Siahaan, 2006, *Wewenang PTUN menunda Berlakunya Keputusan Pemerintah*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta.

- Martiman Prodjohamidjojo, 1993, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Miriam Budiardjo, 2003, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Muchsan, 1981, *Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- , 1992, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad Tahir Azhary, 2003, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Edisi Kedua*, Kencana, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya.
- , 1993, *Pemerintah Menurut Hukum (Wet-en Rechtmatig Bestuur)*, Yurika, Surabaya.
- , *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Pidato diucapkan pada peresmian penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, tanggal 10 Oktober 1994.*
- Philipus M. Hadjon, *et.,al*, 1994, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administratif Law)*, Cet. Ketiga, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2014, *Argumentasi Hukum*, cetakan keenam, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Ramlan Surbakti, 2010, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta.

- R. Wiyono, 2009, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta
- S F. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- SF Marbun dan Moh. Mahfud MD, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Sjachran Basah, 1992, *Hukum Acara Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA)*, Cetakan kedua, Rajawali Pers, Jakarta.
- , 2010, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara Republik Indonesia*, Alumni, Bandung
- Soemaryono dan Anna Erliyana, 1999, *Tuntunan Praktik Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara*, PT. Primamedia Pustaka, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sri Soemantri M., 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata*, Liberty Yogyakarta.
- , 2010, *Penemuan Hukum sebuah Pengantar*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- , 2011, *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Supandi, 2011, *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara (Kepatuhan Hukum Pejabat Dalam Mentaati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara)*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Suparto Wijoyo, 2005, *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi (Peradilan Tata Usaha Negara)*, Edisi Kedua, Airlangga University Press, Surabaya.
- W.F. Prins, 1978, *Inleiding tot het administratief recht*, Terjemahan R. Kosim Adisapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Cet.3, Pradnya Paramita, Jakarta.

W. Riawan Tjandra, 2009, *Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mendorong Terwujudnya Pementahan Yang Bersih dan Berwibawa*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

-----, 2005, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Revisi*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yance Arizona, 2014, *Konstitusionalisme Agraria*, STPN Press, Yogyakarta.

Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zairin Harahap, 2002, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Revisi*, Rajawali Pers.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata usaha negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan



Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1973 Tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

B. JURNAL, MAJALAH, MAKALAH, TESIS, DISERTASI.

Supandi, *Kepatuhan Hukum Pejabat Dalam Menaati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan*, Ringkasan Penelitian (Disertasi) pada Universitas Sumatera Utara, Medan, 2005.

Dani Elpah, *Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Makalah Disampaikan Dalam Bimbingan Teknis Bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Se-Wilayah Hukum PTTUN Medan, Di Hotel Grand Antares, Medan, 19 Mei 2014.

C. PUTUSAN PENGADILAN

Penetapan PTUN Padang Nomor: 03/G/2012/PTUN-PDG tanggal 10 Februari 2012.

Putusan PTUN Padang Nomor: 03/G/2012/PTUN-PDG tanggal 29 Mei 2012.

Penetapan PTUN Padang Nomor: 09/G.Pen /2010/PTUN-PDG tanggal 29 Juni 2010.

Putusan PTUN Padang Nomor: 09/G/2010/PTUN-PDG tanggal 16 Agustus 2010.

Penetapan PTUN Padang Perkara Nomor: 04/G/2010/PTUN-PDG tanggal 10 Februari 2010.

Putusan PTUN Padang Perkara Nomor: 04/G/2010/PTUN-PDG tanggal 11 Maret 2010.

Putusan PTUN Jakarta Nomor: 73/G/2012/PTUN-JKT tanggal 29 Nopember 2012.

Penetapan PTUN Jakarta Nomor; 73/G/2012/PTUN-JKT tanggal 14 Mei 2012.

Penetapan PTUN Jakarta Nomor: 62/G/2015/PTUN-JKT tanggal 1 April 2015.

Putusan PTUN Jakarta Nomor: 62/G/2015/PTUN-JKT tanggal 18 Mei 2015.

Penetapan PTUN Jakarta Nomor: 91/G/2015/PTUN-JKT tanggal 25 Mei 2015.

Putusan PTUN Jakarta Nomor: 91/G/2015/PTUN-JKT tanggal 14 Juli 2015.

Penetapan PTUN Medan Nomor: 81/G/PEN/2010/PTUN-MDN tanggal 21 Oktober 2010

Putusan PTUN Medan Nomor: 81/G /2010/PTUN-MDN tanggal 8 November 2010.

D. KAMUS

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1999, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, ed.2-cet.10

